

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terkenal dengan teknologinya yang canggih. Jepang juga menjadi salah satu ekonomi terkuat yang ada di dunia. Teknologi Jepang sangat berpengaruh bagi ekonomi dunia, Jepang menyumbangkan beberapa Perusahaan terkemuka seperti Panasonic, Sony, dan Toyota yang menjadikan ekonomi Jepang menjadi kuat.¹ Kemajuan yang dihadapi oleh Jepang ini tidak lain karena orang Jepang yang giat bekerja. Mereka dapat menemukan inovasi-inovasi yang baru sehingga membuat teknologi-teknologi canggih di Jepang bervariasi dan menjadi contoh untuk negara lain.

Dengan majunya kemajuan Jepang ini tidak dipungkiri bahwa terdapat tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi di tempat umum dari tempat kerja hingga transportasi umum. Tindakan kriminal atau kejahatan besar ini seperti penculikan, perdagangan manusia, penyerangan tidak senonoh, perampokan, pembakaran, dan pembunuhan. Bahkan Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sekitar 8,1% atau setara dengan 715 kasus dengan jumlah kasus kejahatan besar sebesar

¹ Global Business Network INC. (2023, February 15). *6 Alasan Jepang Menjadi Negara Maju (日本が先進国である6つの理由)*. Gbni.Co.Id. <https://www.gbni.co.jp/recipe/6-alasan-jepang-menjadi-negara-maju/>

9.536%.² Pada Pelecehan seksual meningkat dengan jumlah 204 kasus dan menjadi 2,451 kasus pada tahun 2022.³

Pelecehan seksual yang terjadi di Jepang sudah terjadi sejak dulu pada masa Perang Dunia II pada tahun 1942-1945. Pelecehan Seksual tersebut bernama *Jugun Ianfu*. *Jugun Ianfu* atau yang disebut dengan *comfort women* adalah sekelompok wanita yang diculik oleh tentara Jepang dengan di iming-iming sekolah gratis. Para wanita di *Jugun Ianfu* ini dipaksa menjadi pemuas nafsu para tentara Jepang pada masa itu. Sedangkan untuk istilah *Geisha* memiliki arti seniman, entertainer, penghibur. Meskipun pelecehan seksual sudah terjadi dari dulu, tidak dipungkiri bahwa pelecehan seksual di Jepang pada masa ini masih sering terjadi. Pelecehan seksual ini dapat terjadi di transportasi umum, tempat kerja, sekolah, hingga kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun Jepang termasuk dalam negara maju, tidak dipungkiri kejahatan besar atau pelecehan seksual ini bisa terjadi. Penyerangan tidak senonoh dan pemerkosaan sering terjadi pada Jepang yang termasuk dalam kategori kasus pelecehan seksual. Pelecehan Seksual sendiri adalah sebuah perilaku dengan berbau seksual yang dilakukan secara sengaja dan korban pada umumnya tidak menghendakinya. Pelecehan seksual ini bisa berbentuk tulisan, isyarat, tindakan, ucapan, dan simbol. Tindakan bisa dikatakan sebagai

² Sari, E. P., Roosiani, I., & Martia, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Chikan Terhadap Penumpang Wanita. *Jurnal Bahasa Dan Budaya Jepang, Volume 06*(Issue 01). <http://repository.unsada.ac.id/7069/1/Analisis%20Faktor%20Penyebab%20Pelaku%20Melakukan%20Chikan%20Terhadap....pdf>

³ KYODO. (2023, September 7). *Record 219,000 cases of child abuse logged in Japan in fiscal '22*. Thejapantimes. <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/09/07/japan/child-abuse-cases-hit-record/>

pelecehan seksual jika terdapat sebuah pemaksaan secara sepihak oleh pelaku, Pelecehan ini murni karena motivasi pelaku, pelecehan tidak diinginkan oleh korban, dan korban merasakan penderitaan akibat pelecehan tersebut.⁴ Kemudian untuk menghindari banyaknya pelecehan seksual, Jepang juga telah melegalkan *The Comprehensive Labor Policy Promotion Act (CLPPA) No. 24 of 2019* yang mana undang-undang ini bermaksud untuk menghilangkan pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, serta pelecehan terhadap Perempuan di tempat Kerja. Undang-Undang ini dikenal sebagai *Power Harassment* di Jepang.⁵ Pada bulan Juli 2023 pemerintah Jepang sudah menyetujui Langkah-langkah untuk mencegah pelecehan seksual anak di bawah umur, termasuk juga bagi para kaum laki-laki.⁶ Pada bulan Juli 2023 pemerintah Jepang sudah menyetujui Langkah-langkah untuk mencegah pelecehan seksual anak di bawah umur, termasuk juga bagi para kaum laki-laki.⁷

Pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, salah satunya yang sering terjadi adalah transportasi umum kereta bawah tanah Jepang. Pelecehan seksual pada kereta bawah ini sering terjadi khususnya pada saat jam sibuk kerja pada pagi hari dan sore hari. Pelecehan Seksual ini sering terjadi jika kondisi sedang

⁴ Utami, S. W. (2016). *HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN PELECEHAN SEKSUAL PADA REMAJA DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO*. <https://repository.ump.ac.id/3830/1/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20COVER.pdf>

⁵ Industrial Relations and Labour Law. (2021, March). Japan, new law to deal with harassment and abuse of power at work. [Industrialrelationsnews.Id. https://industrialrelationsnews.ioe-emp.org/industrial-relations-and-labour-law-march-2021/news/article/japan-new-law-to-deal-with-harassment-and-abuse-of-power-at-work](https://industrialrelationsnews.ioe-emp.org/industrial-relations-and-labour-law-march-2021/news/article/japan-new-law-to-deal-with-harassment-and-abuse-of-power-at-work)

⁶ Admin News. (2023, July 26). *Pemerintah Jepang Setujui Langkah Pencegahan Pelecehan Seksual terhadap Anak*. NHK WORLD - JAPAN. <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/436509/>

⁷ *Ibid*

sangat ramai. Hal inilah yang membuat pelaku melancarkan aksinya, karena pada saat keadaan ramai diyakini tidak ada orang yang mengetahui.

Pelecehan seksual ini bisa seperti memotret orang yang menggunakan rok pendek, membisikkan rayuan, dan meraba atau menyentuh anggota tubuh. Meraba atau menyentuh anggota tubuh korban pada Jepang biasa disebut dengan *Chikan* (痴漢).⁸ *Chikan* dalam bahasa Inggris adalah *pervert* yang berarti seseorang yang bersifat tidak wajar, dalam artian bahwa seseorang melakukan pelecehan seksual di tempat umum. Dalam Kanji arti *Chi* (痴) adalah bodoh sedangkan arti dari Kanji *Kan* (漢). Maka kata *Chikan* dikuhsusukan kepada laki-laki yang berarti orang bodoh yang suka menggoda wanita.⁹

Chikan sendiri sudah ada sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20 semenjak transportasi umum ini telah berkembang. Pada tahun 1927 ini telah diperkenalkan jalur kereta bawah tanah pertama, yaitu Ginza Line. Hal tersebut diyakini mulainya era transportasi umum massal di Jepang. Dengan Urbanisasi yang pesat, terutama saat pasca Perang Dunia II, kota-kota besar seperti Tokyo mengalami peningkatan jumlah penumpang kereta api dan kepadatan di transportasi umum. Dengan adanya kondisi lingkungan yang ramai ini menciptakan lingkungan yang padat dan seringkali bersempit-sempitan, di mana dalam kondisi ini individu

⁸ Sari, E. P., Roosiani, I., & Martia, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan *Chikan* Terhadap Penumpang Wanita. *Jurnal Bahasa Dan Budaya Jepang, Volume 06*(Issue 01). <http://repository.unsada.ac.id/7069/1/Analisis%20Faktor%20Penyebab%20Pelaku%20Melakukan%20Chikan%20Terhadap....pdf>

⁹ Natalie, I. (2008). *Analisis Fenomena dan Perilaku Chikan di Densha*. <https://repository.maranatha.edu/7654/>

bisa dengan mudah bergerak tanpa terdeteksi. Hal inilah yang memungkinkan pelaku pelecehan seksual Chikan untuk beraksi dengan resiko yang rendah untuk tertangkap.¹⁰

Pelaku *Chikan* umumnya mengganggu wanita pada saat keadaan kereta bawah tanah sedang ramai atau padat. Keadaan yang sedang ramai dan padat ini umumnya terjadi di kendaraan-kendaraan umum dan kebanyakan kasus pelecehan seksual *Chikan* dilakukan pada kereta bawah tanah. Para *Chikan* biasanya meraba-raba bagian anggota tubuh yang sensitif seperti paha, pantat, dan payudara. Para korban pelaku pelecehan seksual *Chikan* ini umumnya akan terkena rasa trauma yang mendalam bahkan tidak sedikit juga para korban pelaku pelecehan seksual *Chikan* ini melakukan aksi bunuh diri. Hal ini lah yang harus dicegah oleh pemerintah untuk mengurangi pelecehan seksual *Chikan* dan rasa trauma yang dialami oleh pelaku.

Bahkan kejadian *Chikan* ini telah dialami oleh seorang mahasiswi yang bernama Kumi Sasaki selama 6 tahun lamanya, yaitu pada saat usia 12 hingga 18 tahun, atau setara dengan siswa bangku pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama).¹¹ Para korban pelecehan seksual *Chikan* ini umumnya mendapati rasa trauma yang mendalam. Pelaku *Chikan* juga pernah didapati menguntit hingga sampai kerumah. Umumnya pelaku *chikan* ni berusia sekitar 10-60 tahunan.¹²

¹⁰ SANDRA. (2021, September 29). *And introduction to Chikan in Jepang: the current situation and personal experience*. Hapasjapan. <https://hapasjapan.com/an-introduction-to-chikan-in-japan/>

¹¹ Suhartono, A. (2018, January 29). *Kisah Wanita Jepang Korban Pelecehan Seksual di Kereta Selama 6 Tahun*. Inews.Id. <https://www.inews.id/news/internasional/kisah-wanita-jepang-korban-pelecehan-seksual-di-kereta-selama-6-tahun>

¹² *Ibid*

Pihak Kepolisian juga mendapati banyak sekali laporan tentang pelecehan seksual ini, bahkan pihak kepolisian mengatakan setiap tahunnya terjadi peningkatan. Namun pihak kepolisian tidak mengambil tindakan yang membuat rasa jera kepada pelaku, sehingga para pelaku *Chikan* merasa hal itu diperbolehkan dan terus melakukan aksi bejatnya. Biasanya para korban dari *Chikan* ini berusia 20 hingga 30 tahun, namun tidak dipungkiri juga bahwa ada korban di bawah umur, karena pelecehan seksual yang dilakukan *Chikan* ini tidak mengenal kapan, dan siapa saja.¹³ Salah satu survey pada tahun 2000-an yang diajukan oleh siswa di sekolah menengah mengatakan bahwa sekitar 70% pernah mengalami perlakuan yang tidak senonoh ini, dan juga survey yang dilakukan oleh pekerja wanita menyebutkan sekitar 17% pernah mengalami juga perbuatan yang tidak senonoh ini.

Chikan sendiri sudah tidak asing di telinga Masyarakat Jepang. Jika mengatakan *Chikan* pasti akan merujuk kepada sebuah laki-laki yang melakukan pelecehan seksual yang terjadi di Kereta Bawah Tanah. Fenomena *Chikan* ini sudah menjadi hal yang serius di Jepang. Berkembangnya *Chikan* di Jepang juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, dimana budaya Jepang masih kental dengan istilah Patriarki, dimana laki-laki menganggap dirinya superior, lebih berkuasa dari wanita, dan juga laki-laki menilai bahwa mereka lebih dominan daripada wanita. *Chikan* sendiri adalah sebuah tindakan pelaku untuk mengurangi stress nya dengan menindas orang yang lemah daripada dirinya sendiri. Yang dimaksud orang yang

¹³ *Ibid. Hal, 3*

lemah disini adalah wanita dan anak-anak. Keinginan laki-laki untuk mendominasi merupakan dasar dari semua pelecehan seksual.¹⁴

Departemen Kepolisian Tokyo mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 kasus pelecehan seksual termasuk *Chikan* terdapat 1.780 Kasus. Berdasarkan pernyataan tersebut penting untuk melakukan tindakan atau upaya pencegahan terhadap kasus *Chikan* di Jepang. Hal ini akan berguna untuk mengurangi kasus *Chikan* di Jepang. Upaya pencegahan penting untuk dilakukan agar semua orang yang akan menggunakan kereta bawah tanah merasa aman dan nyaman. Kemudian pada kasus pelecehan seksual *chikan* umumnya akan dituntut oleh polisi di bawah pasal 176 hukum pidana sebagai ketidaksenonohan secara paksa atau disebut dengan *Forcibel Indecency*¹⁵. Pasal 176-178 ini memuat seperti ketidaksenonohan secara paksa, hubungan seksual secara paksa, ketidaksenonohan secara semu, dan hubungan seksual secara semu.¹⁶

Pemerintah Jepang sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk menghentikan adanya *Chikan* ini, yaitu membuat gerbong khusus Perempuan di kereta bawah tanah. Langkah tersebut sudah dilakukan di Jepang sejak tahun 2002, pada kota-kota yang ramai akan pekerja. Bahkan di Kandai, Osaka, dan Kobe mengoperasikan gerbong khusus wanita setiap harinya. Di stasiun-stasiun juga

¹⁴ *Ibid. Hal, 46*

¹⁵ Thompson, N. (2018, August 8). *What happens when women report sexual assault in Japan?* GlobalVoices. [https://globalvoices.org/2018/08/08/what-happens-when-women-report-sexual-assault-in-japan/#:~:text=Generally%20incidents%20of%20groping%20by,indecency%E2%80%9D%20\(%E5%BC%B7%E5%88%B6%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4\).](https://globalvoices.org/2018/08/08/what-happens-when-women-report-sexual-assault-in-japan/#:~:text=Generally%20incidents%20of%20groping%20by,indecency%E2%80%9D%20(%E5%BC%B7%E5%88%B6%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4).)

¹⁶ Japanese Law Translation. (1999). *Acr on Punishment of Organized Crimes and Control of Proceeds of Crime*. <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3587>

telah dilekatkan poster untuk memperingatkan tentang pelecehan seksual *Chikan* ini.¹⁷ Bahkan pemerintah juga menerapkan sebuah kebijakan mengenai suara ponsel kamera di Jepang yang tidak dapat dimatikan, hal ini untuk mencegah adanya pemotretan atau pengambilan video, karena pada dasarnya laki-laki sering mengambil foto orang yang berpakaian rok pendek ketika berada di kereta bawah tanah.¹⁸

Dengan adanya latar belakang tentang Pelecehan seksual *Chikan* yang terjadi di kereta bawah tanah, Penelitian ini ingin meneliti bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mencegah pelecehan seksual *Chikan* ini, karena pencegahan ini harus dilakukan agar pelecehan seksual *Chikan* dan korban dari pelecehan tersebut tidak semakin banyak.

1.2.Rumusan Masalah

Peneliti melihat bahwa pelecehan seksual *Chikan* ini sudah menjadi isu yang penting untuk segera ditindak lanjuti. Pelecehan Seksual *Chikan* ini hingga membuat orang merasa trauma akibat perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh para pelaku. *Chikan* ini sudah meresahkan masyarakat Jepang yang umumnya mereka melakukan kerja di tempat-tempat publik. Dengan adanya latar belakang yang telah peneliti susun, oleh sebab itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Bagaimana Upaya Pemerintah Jepang dalam menangani Kasus Pelecehan Seksual *Chikan* di Kereta Bawah Tanah?**

¹⁷ SABRINA. (2019). *ALL ABAOUT CHIKAN, SEXUAL HARRASSMENT IN JAPAN*. Skdesu.Com. <https://skdesu.com/en/all-about-chikan-the-sexual-harassment-in-japan/>

¹⁸ Smith, M. (2016, October 1). *Japan's noisy iPhone problem*. Engadget. <https://www.engadget.com/2016-09-30-japans-noisy-iphone-problem.html>

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang bagaimana kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Jepang untuk mengatasi dan mencegah pelecehan seksual *Chikan* yang terjadi di kereta bawah tanah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1.Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini peneliti berharap dapat menjadikan penelitian ini sebagai sebuah informasi untuk para Mahasiswa maupun para pembaca tentang Pelecehan Seksual *Chikan* yang terjadi di Jepang. Para pelaku *Chikan* ini sampai sekarang masih berkeliaran di stasiun hingga kereta bawah tanah, sehingga Pemerintah harus segera menindak lanjuti tentang *Chikan* ini, karena pada setiap tahun Pelecehan Seksual termasuk *Chikan* meningkat tiap tahunnya. Pemerintah memberlakukan beberapa upaya dan kebijakan untuk memerangi pelecehan seksual ini.

1.3.2.2.Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis ini peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk dirinya sendiri dan dapat menjadi sebuah wawasan agar terciptanya lingkungan yang lebih baik lagi. Penelitian yang telah diteliti ini akan membuat peneliti menjadi lebih memahami tentang pelecehan seksual *Chikan* yang telah terjadi di Jepang dan akan lebih memahami tentang konsep yang peneliti pakai yaitu Kebijakan Publik.

1.4. Penelitian Terdahulu

Untuk mengerjakan dan menyusun penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa *Literature Review* atau penelitian terdahulu yang saling berhubungan satu sama lain dengan topik yang akan diangkat dan dibahas. Dengan adanya penelitian Terdahulu ini, peneliti akan menjadikan penelitian tersebut sebagai sebuah acuan pembaharuan dan pembeda dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Eva Putri Sari, Indun Roosiani, dan juga Tia Martia¹⁹ dengan judul **Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan *Chikan* Terhadap Penumpang Wanita**. Dalam Penelitian ini disebutkan bahwa *Chikan* merupakan sebuah fenomenal sosial yang sering terjadi di Jepang. *Chikan* juga termasuk sebagai pelecehan seksual yang terjadi pada Kereta Bawah Tanah di Jepang. Para Pelaku *Chikan* biasanya melakukan hal ini pada pagi hari saat orang berangkat kerja dan sore hari saat orang pulang ke rumah., pada saat inilah kereta bawah tanah akan penuh dan dalam kondisi yang saling berdesakan. Salah satu yang menjadi alasan *Chikan* ini masih saja dilakukan karena Tingkat Patriarki yang masih tinggi di Jepang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memaparkan, menganalisis, dan mengetahui mengenai fenomena *Chikan* yang telah terjadi di Jepang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan para pelaku *Chikan* melakukan aksi nya ini. Kemudian Penelitian ini juga memaparkan bagaimana upaya pencegahan yang

¹⁹ Sari, E. P., Roosiani, I., & Martia, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Chikan Terhadap Penumpang Wanita. *Jurnal Bahasa Dan Budaya Jepang, Volume 06*(Issue 01). <http://repository.unsada.ac.id/7069/1/Analisis%20Faktor%20Penyebab%20Pelaku%20Melakukan%20Chikan%20Terhadap....pdf>

dilakukan oleh pihak terkait untuk mengurangi jumlah kasus *Chikan* yang setiap hari nya selalu ada. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Analisi dengan jenis Penelitian Kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian terdahulu ini menggunakan Teknik *Library Research*. Penelitian ini menemukan bahwa sudah terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Tokyo, dan itu membuktikan bahwa tingkat pelecehan seksual *chikan* sudah menurun. Selanjutnya Hasil dari penelitian ini mengungkapkan beberapa alasan yang membuat para pelaku ini melakukan perbuatan *Chikan* dan juga beberapa upaya memerangi fenomena *Chikan* di Jepang.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada Objek yang ingin dibahas yaitu sama-sama membahas *Chikan* yang terjadi di Jepang. Kemudian Persamaan lainnya terletak pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk memerangi pelecehan seksual *Chikan* ini. Namun pada penelitian ini tidak ada mencantumkan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang yang ada dalam Hukum. Adapun pembeda dari penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada teori yang digunaka. Tidak ada Teori yang digunakan oleh Peneliti terdahulu ini, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep kebijakan Publik yang menjadi sebuah dasar untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian Terdahulu Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Natalie²⁰ dengan judul **Analisis Fenomena dan Perilaku Chikan di Densha**. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa para pelaku pelecehan seksual ini sering terjadi pada Densha. Densha adalah sebuah KRL di Jepang dengan peminatnya yang banyak. Peminat dari Densha ini kebanyakan adalah para pekerja kantoran, namun juga banyak orang dari berbagai kalangan menggunakan Densha sebagai alat transportasi mereka sehari-hari. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari anak sekolah hingga kakek nenek menggunakan Densha pada setiap harinya. Hal itulah yang membuat padatnya penumpang dalam transportasi Densha. Pada Densha sendiri mempunyai jam-jam padat seperti pada pagi hari dan sore ketika para pekerja, anak sekolah untuk pulang kerumah. Dengan padatnya penumpang pada Densha ini merupakan hal menguntungkan bagi pelaku *Chikan*, karena pastinya akan lebih mudah untuk melakukan aksinya dengan meraba tubuh korban, hingga memotret wanita yang menggunakan rok.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu pada objek yang diteliti, yaitu tentang pelecehan seksual *Chikan* yang terjadi di Densha atau kereta bawah tanah di Jepang. Pada Peneliti terdahulu ini tidak ditemukan Teori yang digunakan, sehingga ini akan menjadi pembeda dengan penelitian yang peneliti akan bahas. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik yang akan

²⁰ Natalie, I. (2014). *Analisis Fenomena dan Perilaku Chikan di Densha*. <https://repository.maranatha.edu/7654/>

menganalisis upaya kebijakan pemerintah Jepang terhadap kasus pelecehan seksual *Chikan* di Jepang.

Penelitian Terdahulu Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Mitutoshi Horii dan Adam Burgess²¹ dengan judul **Constructing sexual risk: ‘Chikan’, collapsing male authority and the emergence of women-only train carriages in Japan**. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Gerbong kereta khusus wanita ini adalah sebuah tanggapan dari Jepang akan adanya *Groping* atau *Chikan* yang secara besar dilakukan oleh para laki-laki. Dengan adanya upaya gerbong khusus wanita ini bertujuan tidak lain dengan tujuan agar wanita aman dan bebas dari pelecehan seksual. Penelitian ini telah melakukan sebuah wawancara yang membahas tentang bagaimana tanggapan wanita terhadap Gerbong khusus wanita ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa wawancara yang telah dilakukan mengungkapkan hasil bahwa dukungan wanita terhadap gerbong khusus wanita ini tidak hanya karena ketakutan akan pelecehan seksual *Chikan*, melainkan terdapat alasan lain seperti penolakan simbolis terhadap jenis maskulinitas tertentu. Dukungan dari para wanita terhadap Gerbong khusus wanita adalah sebuah penolakan secara tidak langsung terhadap patriarki yang ada di Jepang. Namun, wawancara yang dilakukan juga mengungkapkan bahwa gerbong khusus wanita ini terletak pada gerbong terakhir pada kereta, hal itu jelas membuat repot, dan sebagian wanita menganggap bahwa itu adalah sebuah masalah yang hanya

²¹ Horii, M., & Burgess, A. (2012). Constructing sexual risk: “Chikan”, collapsing male authority and the emergence of women-only train carriages in Japan. *Health, Risk and Society*, 14(1), 41–55. <https://doi.org/10.1080/13698575.2011.641523>

dipinggirkan bukan dihadapi. Hal itu memperkuat argumen bahwa ranah publik masih didominasi oleh laki-laki.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada objek dengan objek yang sama-sama membahas tentang Pelecehan seksual *Chikan* yang terjadi di kereta bawah tanah. Dalam penelitian terdahulu ini tidak ditemukan teori yang digunakan oleh sebab itu, hal itu bisa digunakan sebagai pembeda dengan penelitian ini. Di penelitian ini peneliti menggunakan Teori kebijakan publik untuk menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah terkait pelecehan seksual *Chikan*.

Penelitian terdahulu keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Fathima Azmiah Marikkar dengan judul **Sexual Harassment: A Social Issue in Japan.**²² Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan diskriminasi terhadap Perempuan harus dihentikan. Diskriminasi dalam bentuk apapun harus dilawan. Perempuan harus diberikan hak dan hormat yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Perempuan dalam dunia kerja dilecehkan. Banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa Perempuan akan dilecehkan jika jumlahnya atau populasi dalam sebuah perusahaan sedikit. Dalam dunia kerja di Jepang menunjukkan bahwa Tingkat pelecehan seksual ini banyak terjadi dalam bidang tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa para Perempuan enggan melaporkan pelecehan seksual ini dikarenakan malu dan mereka memilih diam jika tidak ada ganti rugi dalam pemerintah. Bahkan peneliti

²² Marikkar, F. A. (2009). *Sexual Harassment: A Social Issue in Japan*. 国際経営論集, 38, 123-131. <https://core.ac.uk/download/pdf/291679549.pdf>

mengungkapkan jika kerja sebaiknya dipisahkan berdasarkan gender dan hal itu akan membuat mereka rentan terkena pelecehan seksual.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada pelecehan seksual yang terjadi di Jepang, namun yang membedakan penelitian ini dengan peneliti terdahulu keempat terletak pada tempat yang diteliti, jika penelitian terdahulu ini meneliti tentang pelecehan seksual di tempat kerja, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pelecehan seksual yang terjadi di kereta bawah tanah atau lebih dikenal dengan *Chikan*.

Penelitian terdahulu kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ryuichi Yamakawa²³ dengan judul **We've Only Just Begun: The Law of Sexual Harassment in Japan**. Dalam penelitian ini mengungkapkan bagaimana hukum Jepang memandang pelecehan seksual dengan membandingkan hukum Amerika Serikat terkait tindakan pelecehan seksual yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini mengungkapkan juga bahwa pelecehan seksual di Jepang banyak terjadi di tempat kerja. Dimana Perempuan banyak mendapatkan tindak diskriminasi karena mereka lebih minoritas pada tempat kerja tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem hukum di Jepang dan Amerika Serikat memiliki dua perbedaan. Pengadilan Jepang lebih mengandalkan "*Personal Rights*" sebagai sebuah pertanggungjawaban untuk melawan hukum atas pelecehan seksual. Kedua

²³ Yamakawa, R. (1999). We 've Only Just Begun: The Law of Sexual Harassment in Japan. *Hastings Internasional and Comparative Law Review*, Volume 22. https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1503&context=hastings_international_comparative_law_review

Pengadilan Jepang memutuskan bahwa peninggi Perusahaan tersebut akan bertanggung jawab atas pelecehan seksual yang yang berlaku.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu pada objek yang diteliti yaitu mengenai pelecehan seksual, namun penelitian terdahulu ini lebih membahas dari sisi hukum dengan membandingkan hukum di Jepang dan di Amerika Serikat. Penelitian terdahulu ini juga lebih fokus pada pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja.

Penelitian terdahulu keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Prianter Jaya Hairi²⁴ dengan judul **Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya**, Menurut penelitian ini, pada tahun 2015 kasus kekerasan seksual telah meningkat. Data yang telah dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terus meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dinilai kurang. Meskipun undang-undang yang menangani kekerasan seksual telah dibuat, mereka masih memiliki banyak kekurangan yang membuatnya tidak efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat menangani kekerasan seksual melalui kebijakan adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan mengenai kekerasan seksual harus ditingkatkan karena peran pemerintah saat ini dianggap tidak efektif. Pemerintah

²⁴ Hairi, P. J. (2015). *PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL: MENELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA*.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/243>

harus menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual atau merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Konsep kebijakan kriminal dan kekerasan seksual digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan fokus yaitu pada Fokus penelitian, yaitu pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Adapun Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada konsep yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan konsep Kebijakan Kriminal dan Kekerasan Seksual, sedangkan penelitian ini menggunakan kebijakan publik sebagai landasan konsep untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Jepang untuk mengatasi pelecehan seksual *chikan*.

Penelitian terdahulu ketujuh ini penelitian yang dilakukan oleh Chika Shinohara²⁵ dengan judul **How Did Sexual Harassment Become a Social Problem in Japan? The Equal Employment Opportunity Law and Globalization**. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana gender lokal khususnya pelecehan seksual berubah sejak awal *Legal Reform*. Peneliti ini mengungkapkan bahwa terdapat proses difusi norma pada pelecehan seksual terhadap Masyarakat sipil Jepang. Pelecehan seksual di Jepang menjadi sebuah perhatian Masyarakat Jepang sejak munculnya konsep Sekuhara pada akhir tahun 1980-an. Penelitian ini meneliti bagaimana dan mengapa pelecehan seksual yang dulu tidak dianggap sebagai sebuah masalah di Jepang, namun telah diakui sebagai sebuah masalah.

²⁵ Shinohara, C. (2009). HOW DID SEXUAL HARASSMENT BECOME A SOCIAL PROBLEM IN JAPAN? THE EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY LAW AND GLOBALIZATION. *Perceiving Gender Locally, Globally, and Intersectionally*, 267–309. DOI:10.1108/S1529-2126(2009)0000013014

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu sebelumnya yang terletak pada objek yang dibahas yaitu pelecehan seksual, namun penelitian terdahulu lebih berfokus bagaimana Pelecehan Seksual ini menjadi sebuah masalah yang penting untuk diselesaikan di tangani.

Penelitian terdahulu kedelapan ini penelitian yang dilakukan oleh Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, Sahadi Humaedi²⁶ dengan judul **MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF**. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual kepada perempuan masih sering terjadi. Penelitian ini membahas berbagai alasan mengapa perempuan mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini juga menyelidiki mengapa perempuan enggan untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual yang telah dialaminya kepada pihak yang berwenang, serta membahas pelatihan asertif untuk korban, khususnya Perempuan yang umumnya menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki, sikap permisif, dan hak istimewa laki-laki adalah penyebab kekerasan seksual. Perempuan tidak melaporkan kejadian karena korban kekerasan seksual dianggap negatif oleh masyarakat. Tujuan dengan adanya pelatihan asertif ini berguna untuk perempuan dan korban dari kekerasan seksual untuk berani melakukan sebuah tindakan seperti menolak dan melaporkan apa yang

²⁶ Noviani, U. Z., Arifah, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF. *Jurnal Penelitian Dan PMM*, Vol 5, No: 1, 1–110. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/16035/0>

telah dilakukan oleh pelaku. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan pelatihan asertivitas.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dengan sama-sama membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi pada Perempuan. Namun yang membedakan penelitian ini lebih membahas tentang upaya dan kebijakan apa saja yang dikeluarkan Jepang untuk mengatasi Pelecehan Seksual *Chikan* ini. Negara yang diteliti juga berbeda, Penelitian terdahulu meneliti kasus di Indonesia, sedangkan Penelitian ini membahas negara Jepang.

Penelitian terdahulu kesembilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fiona Creaser²⁷ dengan judul **Sexual Harassment Prevention Policies at Japanese Universities**. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelecehan seksual telah menjadi sorotan publik semenjak ramai diperbincangkan dalam media. Dengan itu Jepang mengakui pelecehan seksual menjadi masalah yang nasional dan bukan masalah yang hanya terjadi di negara-negara barat. Pemerintah Jepang pada 1999 mengubah undang-undang yang ada untuk memasukkan pelecehan seksual ke dalam pasal 21 Undang-Undang Kesetaraan Gender. Pelecehan seksual yang terjadi di Jepang ini banyak terjadi di tempat kerja bahkan pelecehan tersebut menjadi sebuah tanggung jawab bagi petinggi Perusahaan tersebut. Namun Pelecehan dalam Universitas dikecualikan, oleh karena itu peneliti ini meneliti bagaimana cara atau Langkah-langkah untuk mengatasi masalah pelecehan seksual di kampus sejak saat undang-undang tersebut diubah. Universitas melakukan beberapa upaya seperti

²⁷ Creaser, F. (2009). Sexual Harassment Prevention Policies at Japanese Universities. 紀要, 1, 7-18. <https://tama.repo.nii.ac.jp/records/192>

membuat poster, membagikan selebaran, dan menyediakan website yang menangani trauma pasca pelecehan seksual,

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang pelecehan seksual yang terjadi di Jepang, penelitian terdahulu ini juga meneliti bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh universitas untuk mengatasi pelecehan seksual. Upaya yang telah dilakukan Universitas adalah Pembeda dari Penelitian ini dengan peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu fokus pada upaya yang telah dilakukan oleh Universitas terhadap pelecehan seksual. Sedangkan penelitian ini fokus kepada apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang demi mencegah pelecehan seksual *chikan*.

Penelitian terdahulu kesepuluh adalah penelitian yang dilakukan oleh Mina Ohtaka²⁸ dengan Judul 電車内痴漢の分類とその特徴 —新聞報道を用いた探索的分析— atau **Classification of Train Molestations and their Characteristics-An Exploratory Analysis Using Newspaper Reports-**. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penelitian ini telah mengumpulkan sebanyak 208 koran tentang pelecehan seksual di kereta api. Dengan telah mengumpulkannya koran tersebut penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan pelaku dari pelecehan seksual ini adalah pegawai negeri laki-laki Dan Korban dari pelecehan seksual ini adalah siswa sekolah menengah atas bahkan siswa sekolah menengah pertama.

²⁸ Ohtaka, M. (2021). 電車内痴漢の分類とその特徴 新聞報道を用いた探索的分析 (Classification of Train Molestations and their Characteristics-An Exploratory Analysis Using Newspaper Reports-). <https://toyo.repo.nii.ac.jp/records/13009>

Penelitian ini juga menemukan bahwa kejadian pelecehan seksual di kereta bawah tanah ini Sebagian besar terjadi pada pagi dan sore hari, pagi hari ketika Masyarakat sedang pergi untuk bekerja dan sore hari saat Masyarakat sedang pulang untuk ke rumah Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat juga pelaku dari petugas polisi berusia sekitar 40-an, pegawai negeri sipil, pekerja kantoran, dan pengangguran.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan peneliti terdahulu yang terletak pada objek yang ingin diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang pelecehan seksual di kereta bawah tanah. Penelitian terdahulu ini lebih meneliti tentang pelaku dari pelecehan seksual *Chikan* ini sedangkan Penelitian ini lebih mengamati bagaimana upaya Pemerintah Jepang untuk mengatasi Pelecehan Seksual *Chikan* ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	Eva Putri Sari, Indun Rosiani, dan juga Tia Martia “ Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Chikan Terhadap Penumpang Wanita. ”	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat Analisa: Tidak Menggunakan Teori	Hasil dari Penelitian ini mengungkapkan bahwa <i>Chikan</i> merupakan sebuah fenomenal sosial yang sering terjadi di Jepang. <i>Chikan</i> juga termasuk sebagai pelecehan seksual yang terjadi pada Kereta Bawah Tanah di Jepang. Para pelaku <i>Chikan</i> umumnya melaksanakan tindakan ini saat pagi ketika orang berangkat kerja dan sore hari ketika orang pulang untuk kerumah, pada saat inilah kereta bawah tanah akan penuh dan dalam kondisi

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
			yang saling berdesakan. Salah satu yang menjadi alasan <i>Chikan</i> ini masih saja dilakukan karena Tingkat Patriarki yang masih tinggi di Jepang.
2.	Ingrid Natalie “Analisis Fenomena dan Perilaku Chikan di Densha”	Jenis Penelitian: Kualitatif Alat Analisa: -	Densha adalah sebuah KRL di Jepang dengan peminat nya yang banyak. Peminat dari Densha ini kebanyakan adalah para pekerja kantor, namun juga banyak orang dari berbagai kalangan menggunakan Densha sebagai alat transportasi mereka sehari-hari. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari anak sekolah hingga kakek nenek menggunakan Densha pada setiap harinya. Hal itulah yang membuat padatnya penumpang dalam transportasi Densha. Pada Densha sendiri mempunyai jam-jam padat seperti pada pagi hari dan sore ketika para pekerja, anak sekolah untuk pulang kerumah. Dengan padatnya penumpang pada Densha ini merupakan hal menguntungkan bagi pelaku <i>Chikan</i> , karena pastinya akan lebih mudah untuk melakukan aksinya dengan meraba tubuh korban, hingga memotret wanita yang menggunakan rok.
3.	Mitutoshi Horii dan Adam Burgess	Jenis Penelitian: Kualitatif	Penelitian ini telah melakukan sebuah

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
	<p>“Constructing sexual risk: ‘Chikan’, collapsing male authority and the emergence of women-only train carriages in Japan”</p>	<p>Alat Analisa: -</p>	<p>wawancara yang membahas tentang bagaimana tanggapan wanita terhadap Gerbong khusus wanita ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa wawancara yang telah dilakukan mengungkapkan hasil bahwa dukungan wanita terhadap gerbong khusus wanita ini tidak hanya karena ketakutan akan pelecehan seksual <i>Chikan</i>, melainkan terdapat alasan lain seperti penolakan simbolis terhadap jenis maskulinitas tertentu. Dukungan dari para wanita terhadap Gerbong khusus wanita adalah sebuah penolakan secara tidak langsung terhadap patriarki yang ada di Jepang. Namun, wawancara yang dilakukan juga mengungkapkan bahwa gerbong khusus wanita ini terletak pada gerbong terakhir pada kereta, hal itu jelas membuat repot, dan sebagian wanita menganggap bahwa itu adalah sebuah masalah yang hanya dipinggirkan bukan dihadapi. Hal itu memperkuat argumen bahwa ranah publik masih didominasi oleh laki-laki.</p>
4.	<p>Fathima Azmiah Marikkar “Sexual Harassment: A</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif Alat Analisa: -</p>	<p>Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan diskriminasi terhadap Perempuan harus</p>

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
	Social Issue in Japan”		dihentikan. Diskriminasi dalam bentuk apapun harus dilawan. Perempuan harus diberikan hak dan hormat yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Perempuan dalam dunia kerja dilecehkan. Banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa Perempuan akan dilecehkan jika jumlahnya atau populasi dalam sebuah perusahaan sedikit. Dalam dunia kerja di Jepang menunjukkan bahwa Tingkat pelecehan seksual ini banyak terjadi dalam bidang tersebut.
5.	Ryuichi Yamakawa “We’ve Only Just Begun: The Law of Sexual Harassment in Japan”	Jenis Penelitian: Kualitatif Alat Analisa: <i>Personal Rights Approach</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem hukum di Jepang dan Amerika Serikat memiliki dua perbedaan. Pengadilan Jepang lebih mengandalkan “ <i>Personal Rights</i> ” sebagai sebuah pertanggungjawaban untuk melawan hukum atas pelecehan seksual. Kedua Pengadilan Jepang memutuskan bahwa peninggi Perusahaan tersebut akan bertanggung jawab atas pelecehan seksual yang berlaku
6.	Prianter Jaya Hairi “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan	Jenis Penelitian: Tidak Diketahui Alat Analisa: Kebijakan Kriminal dan	Menurut penelitian ini, pada tahun 2015 kasus kekerasan seksual telah meningkat. Data yang telah dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
	Pemerintah dalam Penanggulangannya	Kekerasan Seksual	Manusia atau Komnas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terus meningkat pada setiap tahunnya, Hal ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dinilai kurang. Meskipun undang-undang yang menangani kekerasan seksual telah dibuat, mereka masih memiliki banyak kekurangan yang membuatnya tidak efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat menangani kekerasan seksual melalui kebijakan adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan mengenai kekerasan seksual harus ditingkatkan karena peran pemerintah saat ini dianggap tidak efektif. Pemerintah harus menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual atau merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
7.	Chika Shinohara “How Did Sexual Harassment Become a Social Problem in Japan? The Equal Employment Opportunity Law and Globalization”	Jenis Penelitian: <i>Historical Analysis</i> Alat Analisa: Konsep <i>Sexual Harassment</i> dan <i>Local Society</i>	Penelitian ini meneliti tentang bagaimana gender lokal khususnya pelecehan seksual berubah sejak awal <i>Legal Reform</i> . Peneliti ini mengungkapkan bahwa terdapat proses difusi norma pada pelecehan seksual terhadap Masyarakat sipil Jepang.

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
			<p>Pelecehan seksual di Jepang menjadi sebuah perhatian Masyarakat Jepang sejak munculnya konsep Sekuhara pada akhir tahun 1980-an. Penelitian ini meneliti bagaimana dan mengapa pelecehan seksual yang dulu tidak dianggap sebagai sebuah masalah di Jepang, namun telah diakui sebagai sebuah masalah.</p>
8.	<p>Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, Sahadi Humaedi “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Alat Analisa: Konsep Pelatihan Asertif</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual kepada perempuan masih sering terjadi. Penelitian ini membahas berbagai alasan mengapa perempuan mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini juga menyelidiki mengapa perempuan enggan untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual yang telah dialaminya kepada pihak yang berwenang, serta membahas pelatihan asertif untuk korban, khususnya Perempuan yang umumnya menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki, sikap permisif, dan hak istimewa laki-laki adalah penyebab kekerasan seksual. Perempuan tidak melaporkan kejadian karena korban kekerasan seksual dianggap negatif oleh masyarakat. Tujuan dengan adanya pelatihan</p>

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
			asertif ini berguna untuk perempuan dan korban dari kekerasan seksual untuk berani melakukan sebuah tindakan seperti menolak dan melaporkan apa yang telah dilakukan oleh pelaku.
9.	Fiona Creaser “Sexual Harassment Prevention Policies at Japanese Universities”	Jenis Penelitian: Kualitatif Alat Analisa: -	Pemerintah Jepang pada 1999 mengubah undang-undang yang ada untuk memasukkan pelecehan seksual ke dalam pasal 21 Undang-Undang Kesetaraan Gender. Pelecehan seksual yang terjadi di Jepang ini banyak terjadi di tempat kerja bahkan pelecehan tersebut menjadi sebuah tanggung jawab bagi petinggi Perusahaan tersebut. Namun Pelecehan dalam Universitas dikecualikan, oleh karena itu peneliti ini meneliti bagaimana cara atau Langkah-langkah untuk mengatasi masalah pelecehan seksual di kampus sejak saat undang-undang tersebut diubah. Universitas melakukan beberapa upaya seperti membuat poster, membagikan selebaran, dan menyediakan wesite yang menangani trauma pasca pelecehan seksual,
10.	Penelitian terdahulu kesepuluh adalah penelitian yang dilakukan oleh Mina Ohtaka “電車内痴漢	Jenis Penelitian: Kualitatif Alat Analisa: -	Penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan pelaku dari pelecehan seksual ini adalah pegawai negeri laki-laki. Dan Korban dari

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
	の分類とその特徴 —新聞報道を用いた探索的分析— atau Classification of Train Molestations and their Characteristics-An Exploratory Analysis Using Newspaper Reports “		pelecehan seksual ini adalah siswa sekolah menengah atas bahkan siswa sekolah menengah pertama. Penelitian ini juga menemukan bahwa kejadian pelecehan seksual di kereta bawah tanah ini Sebagian besar terjadi pada pagi dan sore hari, pagi hari ketika Masyarakat sedang pergi untuk bekerja san sore hari saat Masyarakat sedang pulang untuk ke rumah Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat juga pelaku dari petugas polisi berusia sekitar 40-an, pegawai negeri sipil, pekerja kantoran, dan pengangguran.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik yang didefinisikan oleh Harold D. Lasswell merupakan kerangka konseptual yang penting untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik. Harold D. Lasswell, dan Abraham Kaplan, Mendefinisikan Kebijakan Publik “*a project program of goals, values, and practice*” atau sebagai sebuah program yang berorientasi pada pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan program-program yang terarah.²⁹ Lasswell adalah seorang ilmuwan

²⁹ Mariyati, T. (2013). Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, Vol. 11 No. 2, 147–158. <https://media.neliti.com/media/publications/41134-ID-strategi-implementasi-kebijakan-publik-dalam-mendorong-percepatan-pengembangan-p.pdf>

politik Amerika Serikat yang memberikan kontribusi signifikan terutama dalam pengembangan teori komunikasi politik dan analisis kebijakan. Menurut Lasswell, ilmu kebijakan adalah konsep pengetahuan sebagai pemecah masalah. Kebijakan publik ini mencakup banyak bidang, antara lain hukum, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kebijakan ini dapat bersifat nasional, regional atau lokal. Kebijakan publik daerah meliputi Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintahan Kabupaten/Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota/Bupati, Peraturan Kota/Daerah. Menurut Easton, “*The Authoritative Allocation of Values for the whole Society*” atau kebijakan publik adalah alokasi nilai-nilai yang berwenang untuk seluruh masyarakat. Sementara itu, Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*a projected program of goal, value, and practice*” atau kebijakan publik sebagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan program-program tertentu.³⁰

James E. Anderson mengatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah serta badan-badan lainnya, seperti dalam bidang ekonomi, industri, pertahanan, pendidikan, politik, dan sebagainya. Kebijakan ini juga dapat dipengaruhi oleh aktor pemerintah dan juga aktor non-pemerintah.³¹ Harold Laswell dan Abraham Kaplan mengatakan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan tujuan, prinsip, dan perilaku sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Jika kebijakan

³⁰ Jatmiko, A. P., & Suharno, S. (2012). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL*.

³¹ Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi.

tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka implementasi kebijakan tersebut mungkin akan menghadapi resistensi.³²

Kebijakan publik biasanya mempunyai tujuan tertentu dan bukan merupakan hasil dari perilaku yang acak atau tidak rasional. Kebijakan publik mencakup tiga dimensi, yaitu kebijakan publik sebagai sebuah prinsip, kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang sah, dan kebijakan publik sebagai sebuah teori. Secara umum, kebijakan publik ini seringkali bersifat memerintah dan bersifat positif. Pengertian kebijakan publik adalah suatu kegiatan atau tindakan yang diusulkan untuk menanggapi tuntutan individu, kelompok, komunitas, atau pemerintah di suatu daerah yang menghadapi hambatan, dan kebijakan ini digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³³

Kebijakan publik sendiri umumnya dibuat oleh pemerintah yang berupa sebuah Tindakan-tindakan pemerintah. Tujuan dengan adanya kebijakan publik ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dapat menentukan masa depan setiap negara atau bangsa. Semua negara akan menghadapi masalah yang sama, namun yang membedakan adalah bagaimana cara atau respon pemerintah terhadap masalah atau fenomena tersebut. Cara atau respon tersebut lah yang disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik ini adalah sebuah domain dari

³² *Ibid.* Hal 3

³³ Ria Mardiyanti, -. (2021). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU.*

sebuah Negara. Jadi keunggulan setiap negara ditentukan oleh kebijakan-kebijakan publik apa yang dibuat oleh pemerintah.³⁴

Untuk menciptakan ketertiban umum dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, maka masyarakat harus berpartisipasi. Masyarakat sipil berperan penting dalam proses kebijakan publik dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.³⁵ Agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas dan agar kebijakan dapat efektif, maka kebijakan publik harus benar-benar melibatkan masyarakat.³⁶

Kebijakan Publik Menurut James E. Anderson adalah kebijakan yang telah diputuskan oleh aparat dan badan-badan pemerintah atau "*Public Policies are those policies developed by governmental bodies and official.*". James E. Anderson juga berpendapat bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh aktor pemerintah dan non-pemerintah. 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau selalu mengarah pada tercapainya tujuan tertentu; 2) Kebijakan publik mencakup tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah; 3) Kebijakan publik adalah tindakan yang didorong oleh pemerintah, bukan sekedar rencana yang diusulkan; 4) Kebijakan publik dapat bersifat baik atau buruk berdasarkan tindakan pemerintah terhadap suatu permasalahan atau kejadian tertentu, kemudian bersifat negatif

³⁴ Nuryanti, M. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.

³⁵ Lubis, S. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *DEMOKRASI*, Vol. VI No.1, 73–78. <https://media.neliti.com/media/publications/242733-partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-p-db1dce14.pdf>

³⁶ KARMALITA, D. (2017). *ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DIDESA SUNGAI UNGAR UTARA KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN*. <https://repository.uin-suska.ac.id/17570/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu terhadap hal atau permasalahan yang terjadi; 5) Setidaknya kebijakan yang diambil pemerintah harus bersifat positif, dengan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan mengikat.³⁷

Jenis-Jenis kebijakan publik menurut James E. Anderson adalah:

1. *Substantive dan Procedural Policies*

Kebijakan Substantif ini adalah kebijakan yang mencakup apa yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti Pembangunan jalan raya, memberikan tunjangan kesejahteraan, melarang penjualan minuman keras, dan lain sebagainya. Untuk Kebijakan Prosedur ini adalah kebalikan dari kebijakan substantif seperti undang-undang yang mengatur pembentukan badan-badan administrative, menentukan hal-hal yang menjamin jaminan mereka, memberikan kendali presidensial dan yudisial, dan lain sebagainya.³⁸

2. *Distributive, Redistributives, dan Regulatory Policies*

Kebijakan Distributif disini melibatkan alokasi layanan atau manfaat kepada segmen Masyarakat tertentu, seperti indivisu, kelompok, Perusahaan, dan komunitas. Seperti pendidikan sekolah umum gratis, pelatihan kerja, kebijakan tax holiday. Sementara untuk Kebijakan

³⁷ Sulistiyani, R. D. (2014). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH DI KECAMATAN NGAGLIK*. <https://eprints.uny.ac.id/24013/3/BAB%20II.pdf>

³⁸ SINAGA, D. Y. L. (2017). *EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN RESIKO KEHAMILAN (PROLASH) DI PUSKESMAS PRINGSEWU KECAMATAN PRINGSEWU PERIODE 2014-2016*.

Redistributif adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengalihkan alokasi kekayaan, pendapatan property, dan lain-lainnya, seperti contoh pembebasan tanah untuk jalan. Kemudian untuk Regulatory adalah sebuah kebijakan yang berupa larangan atau pembatasan terhadap perilaku individu atau kelompok Masyarakat. Seperti Larangan pemilikan senjata api pada Masyarakat sipil.³⁹

3. *Material Policy*

Kebijakan Material adalah sebuah kebijakan yang menyediakan penghasilan teruntuk orang-orang yang diuntungkan dan memberikan kerugian terhadap orang-orang yang melakukan tindakan tidak baik.

4. *Policies Involving Collective Goods or Private Goods.*⁴⁰

Kebijakan Kolektif adalah sebuah kebijakan yang menyediakan pelayanan bagi keperluan publik yang tidak dapat dibagi dan sifat barang kolektif ini adalah disediakan untuk satu orang, maka semua orang harus juga disediakan. Sementara untuk kebijakan Privat ini adalah kebijakan yang dibagi dan dibiayai untuk untuk pemakai Tunggal namun bisa untuk dibagi.⁴¹

Konsep Kebijakan Publik ini jika dikaitkan dengan Pelecehan Seksual *Chikan* akan menciptakan serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi,

³⁹ Anderson, J. E. (2011). *Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction. Boston: Houghton* . 1–34. <https://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf>

⁴⁰ SINAGA, D. Y. L. (2017). *EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN RESIKO KEHAMILAN (PROLASIH) DI PUSKESMAS PRINGSEWU KECAMATAN PRINGSEWU PERIODE 2014-2016.*

⁴¹ Anderson, J. E. (2011). *Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction. Boston: Houghton* 1–34. <https://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf>

mencegah, dan memberikan dukungan bagi para korban. Dengan adanya suara atau keluhan dari para korban Pelecehan Seksual *Chikan* akan membuat pemerintah segera menangani dan melakukan tindakan yang akan mengurangi pelecehan seksual ini. Kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan oleh Jepang untuk memberantas pelecehan seksual *Chikan* ini didasari oleh tuntutan dari para korban. Dengan begitu Kebijakan Publik ini diyakini merupakan konsep yang tepat untuk pemerintah mengeluarkan kebijakannya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menggambarkan suatu fenomena sosial. Metode ini menggunakan variabel penelitian yang relevan untuk menjelaskan fenomena. Metode penelitian ini mencoba menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi atau telah terjadi dengan mengumpulkan fakta atau kebenaran.⁴²

1.6.2. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penulis memilih pendekatan ini karena pendekatan ini cocok untuk menjelaskan sebuah fenomena yang penulis angkat untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tentang Bagaimana Kebijakan dan Upaya pemerintah dalam mengatasi Pelecehan Seksual *Chikan* yang sering terjadi pada kereta bawah tanah. Terkait dengan teknik analisis

⁴² Salmaa. (2023, February 23). *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya*. <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yaitu data yang berisi informasi informasi tentang fenomena yang disimbolkan bukan dengan angka-angka namun berdasarkan makna. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data-data yang didapatkan dari sumber sumber sekunder, yaitu data data yang diolah dalam bentuk dokumen baik tertulis maupun variabel serta publikasi media daring ataupun media cetak. Data tersebut kemudian dielaborasi dan ditempatkan sesuai dengan sistematika penulisan.⁴³

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Data *Document Researcg*. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk diolah dan dianalisis. Pengumpulan data melalui *Document Research* ini melakukan teknik dengan membaca, mengumpulkan, dan juga mencatat dari sumber data tertulis. Dokumen-dokumen ini kemudian dibaca dengan teliti, dan pernyataan yang berhubungan satu sama lain dipiuh sebagai referensi dari penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian akan disesuaikan dengan rumusan masalah untuk dianalisis lebih lanjut.⁴⁴

⁴³ Mas'Oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.

⁴⁴ Agrita, S. (2014). *ANALISIS PEMAKAIAN SAPAAN PADA CERPEN ARBI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBELAJARAN DALAM MENULIS NASKAH PIDATO SISWA KELAS VI SEKOLAH DASAR*.
https://repository.upi.edu/20054/6/S_BHS_KDSERANG_1004386_Chapter%20%203.pdf

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1. Batasan Materi

Agar pembahasan tidak melenceng dan melebar terlalu jauh, peneliti akan membatasi sebuah penelitian ini dengan peneliti akan melakukan pembahasan dan pencarian data hanya tentang kebijakan dan upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi Pelecehan Seksual *Chikan* yang sering terjadi di Jepang. Kebijakan mengenai pelecehan seksual mengenai *Chikan* memang belum spesifik, namun umumnya jika terdapat pelecehan seksual *Chikan* semua sudah diatur dalam KUHP Jepang (Undang-Undang no. 45 Tahun 1907)⁴⁵ Penelitian ini juga akan membahas bagaimana korban lebih tepatnya wanita ini sangat rentan terkena pelecehan seksual *Chikan*. Batasan Materi ini akan memfokuskan penelitian pada topik yang spesifik dan memungkinkan penulis untuk menghasilkan hasil yang lebih rinci.

1.6.4.2. Batasan Waktu

Batasan Waktu untuk penelitian ini agar tidak melebar terlalu jauh, peneliti akan fokus pada periode waktu tertentu. Batasan waktu ini juga akan membantu peneliti menjawab rumusan masalah dan menjelaskan penelitian ini. Peneliti membatasi penelitian ini dari tahun 2016-2022. Tahun 2016 sendiri pada data yang dikeluarkan statistika mengenai pelecehan seksual *Chikan* Jepang mengalami

⁴⁵ Omoteyama, Y., Matsui, H., & Egami, A. (2023, August 29). *Outline of Harassment Regulations in Japan*. Lexology, Com. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=12f27fa7-d4b0-446b-a6ca-5974346a497c>

penaikan mencapai angka 3,22% yang kemudian terus menurun hingga tahun 2022 dengan angka 2,23%.

1.7.Argumen Pokok

Berdasarkan uraian dan landasan konseptual serta rumusan masalah yang telah dijabarkan. Maka Hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah pemerintah melakukan beberapa upaya dan kebijakan untuk mengatasi Pelecehan Seksual *Chikan* ini. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memerangi pelecehan seksual *Chikan* ini. Upaya tersebut dilakukan pada tempat yang rawan terjadi pelecehan seksual *Chikan* ini seperti pada stasiun hingga gerbong yang akan digunakan oleh masyarakat khususnya perempuan. Selain Pemerintah terdapat juga organisasi dan gerakan internasional yang membantu Jepang untuk lebih peduli dengan kasus pelecehan seksual yang ada di Jepang. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga badan-badan lainnya seperti bidang ekonomi, pertahanan, pendidikan dan sebagainya diharapkan dapat memberantas dan mencegah pelecehan seksual yang bertujuan untuk membuat para Masyarakat hingga turis merasa aman jika menggunakan kereta bawah tanah ini dan juga diharapkan tidak banyaknya korban lagi dalam kasus pelecehan seksual *Chikan*.

1.8.Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah memahami sistematika penulisan skripsi ini, peneliti akan Menyusun sistematika penulisan dengan dibagi dalam beberapa bab. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

JUDUL	PEMBAHASAN
BAB I PENDAHULUAN	1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Landasan Konseptual 1.6. Metode Penelitian 1.7. Argumen Sementara 1.8. Sistematika Penulisan
BAB II JEPANG DAN PERMASALAHAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL	2.1 Dinamika Pelecehan Seksual <i>Chikan</i> dari Masa ke Masa 2.2 “ <i>Chikan</i> ” dan Rentannya Perempuan di Kereta Bawah Tanah 2.3 Budaya Patriarki dan Rasa Superioritas Laki-Laki
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI CHIKAN DI JEPANG	3.1 Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pelecehan Seksual <i>Chikan</i> dengan konsep Kebijakan Publik 3.2 Upaya Pencegahan Pemerintah untuk mengurangi Pelecehan Seksual <i>Chikan</i> 3.1.1 Penyediaan Fasilitas Gerbong Perempuan 3.1.2 Pengawasan melalui CCTV 3.1.3 Aplikasi <i>Digi Police</i> 3.1.4 <i>Japan Camera Shutter Sound Law</i> 3.1.5 Kampanye Pemberantasan <i>Chikan</i> 3.1.6 Penyediaan Hotline 3.1.7 Lencana Anti <i>Chikan</i>
BAB V Penutup	5.1. Kesimpulan 5.2. Saran